

# **Implementasi Program Smart Living Di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta**

**Muwina Khusnul Qotimah<sup>1</sup>, Riris Suguyarti<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Muwuna khusnul@gmail.com

## **Abstrak**

Sebanyak 70% penduduk Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan akan tinggal dan hidup di kota, dibutuhkan sebuah konsep kota pintar yang dapat memberikan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. *Smart Living* merupakan konsep yang relevan untuk diterapkan dalam kondisi seperti ini, penata kelolaan lingkungan yang layak huni dan bersih akan menciptakan suatu kehidupan perkotaan yang higienis dan efisien bagi pleyanan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program *Smart Living* di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Analisis implementasi program *Smart Living* di Kelurahan Semanggi kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta ini menggunakan teori implementasi George C. Edward III, terdapat 4 Indikator keberhasilan suatu implementasi dalam teori ini yaitu, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program *smart living* di Kelurahan Semanggi sudah berjalan baik namun masih ada kendala untuk perpustakaan yang belum diresmikan sehingga mengalami mangkrak serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sekitar. Maka perlunya pemerintah setempat untuk melakukan komunikasi lebih lanjut melalui sosialisasi terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan yang telah direvitalisasi.

**Kata Kunci :** Implementasi, *Smart Living*, *Smart City*, Kebijakan Publik.

## **Abstract**

*As many as 70% of Indonesia's population in 2045 is estimated to live and live in cities, a smart city concept is needed that can provide a livable place to live for the community and increase the efficiency of public services. Smart Living is a relevant concept to be applied in conditions like this, a livable and clean environmental management will create a hygienic and efficient urban life for the community service itself. The purpose of this study is to analyze and describe how the Smart Living Program is Implemented in Semanggi Village, Pasar Kliwon District, Surakarta City. The analysis of the implementation of the Smart Living program in Semanggi Village, Pasar Kliwon District, Surakarta City uses George C. Edward III's implementation theory, there are 4 indicators of the success of an implementation in this theory, namely, Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. From the research conducted, it can be concluded that the implementation of the smart living program in Semanggi Village has been going well but there are still obstacles for the library that has not been inaugurated so that it is stalled and there is a lack of public awareness of the cleanliness of the surrounding environment. Therefore, it is necessary for the local government to carry out further communication through outreach to the community to increase awareness of the revitalized environment.*

**Keywords:** Implementation, *Smart Living*, *Smart City*, Public Policy

## 1. Pendahuluan

Pada tahun 2045, diperkirakan sekitar 70% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep kota cerdas yang mampu menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. *Smart City* atau kota pintar merupakan sebuah konsep pengembangan perkotaan dengan mengimplementasikan kemajuan teknologi sehingga memungkinkan adanya hubungan antara pemerintah dengan warganya. Konsep *smart city* ini tentunya konsep pengembangan kota yang dibutuhkan di negara berkembang seperti Indonesia, maka dari itu potensi ini harus dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah dalam pemanfaatannya Secara efektif, salah satu strategi yang diterapkan pemerintah adalah melalui Gerakan Menuju 1000 *Smart City*.

Pemerintah pusat, melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Dr. Ir. Rinaldi Munir, seorang pakar teknologi informasi, "*Smart city bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat*" (Munir, 2020). Perhatian terhadap *smart city* semakin meningkat, terutama dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung digitalisasi kota. Sebagaimana dilaporkan oleh Kompas (2020), "*Pemerintah mendorong kota-kota di Indonesia untuk mengadopsi konsep smart city guna meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi pengelolaan kota.*" Dengan adanya *smart city* ini secara tidak langsung berdampak terhadap ekosistem birokrasi pemerintahan sehingga *good government* dan *good public service* dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang aktif dalam mengimplementasikan program *smart city*. Melalui Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2018, pemerintah provinsi menetapkan rencana aksi untuk pengembangan *smart city* yang berfokus pada peningkatan infrastruktur digital, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, "*Smart city adalah cara kita untuk menghadapi tantangan urbanisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat*" (Pranowo, 2021). Saat ini, Pemerintah Jawa Tengah sedang berupaya mewujudkan *smart province* dengan *smart city*, dengan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK. Beberapa langkah yang diambil mencakup integrasi data, aplikasi, infrastruktur TIK, memperluas publikasi informasi dan komunikasi, serta penguatan keamanan informasi. Selain itu, ada sembilan sasaran utama dalam mewujudkan *smart province* dengan *smart city*, yaitu pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, dan tuntas, lingkungan yang layak, nyaman, dan efisien, sistem keamanan masyarakat yang terjamin, serta pengelolaan tata kelola hutan, sampah, limbah, dan energi. Kadiskominfo Jateng, Riena Retnaningrum, menambahkan bahwa pemerintah provinsi terus melakukan sinkronisasi pengembangan *smart province* dengan *smart city* di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci untuk mencapai *smart province* yang efisien dan efektif, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya adopsi teknologi dalam konteks pembangunan berkelanjutan di kota-kota Indonesia, termasuk Surakarta.

Kota Surakarta, menjadi salah satu kota di Jawa Tengah, telah mengambil langkah signifikan dalam menerapkan konsep *smart city* dengan visi "*Surakarta Smart City*".

Sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Surakarta telah meluncurkan program *smart city* dengan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi pengelolaan kota. Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan aplikasi "Sikata" (Sistem Informasi Kota Surakarta) yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, dalam sebuah wawancara menyatakan, "*Kami ingin menjadikan Surakarta sebagai kota yang tidak hanya nyaman untuk ditinggali tetapi juga efisien dan berkelanjutan melalui teknologi*" (Kompas, 2022).

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8.6 Tahun 2022 telah menetapkan *Master Plan Smart City* periode 2021-2026. Rencana ini bertujuan untuk mengembangkan enam dimensi utama: *Smart Environment, Smart Society, Smart Economy, Smart Governance, Smart Branding, dan Smart Living*. Setiap dimensi fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui integrasi teknologi dalam tata kelola kota, dengan partisipasi aktif warga sebagai kunci keberhasilan implementasi *smart city* di Surakarta. Pemerintah kota Surakarta berupaya menciptakan kota yang lebih efisien dan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif. Surakarta, dengan populasi sekitar 500.000 jiwa (BPS Surakarta, 2021), dalam konteks ini, penerapan program *smart city* menjadi krusial untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu dimensi *smart city* yang dikembangkan pemerintah kota Surakarta adalah *smart living*, dimensi *smart living* ini merujuk pada pemukiman yang bersih dan bertata kelola. Diketahui bersama bahwa kota Surakarta dengan kepadatan penduduknya masih memiliki beberapa permukiman yang kumuh. Pemukian yang kumuh ini berdampak pada lingkungan yang tidak sehat sehingga dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular di kawasan permukiman Semanggi.

Semanggi merupakan salah satu daerah perkampungan kumuh yang mendapat perhatian dalam pembangunan yang berfokus dalam dimensi *smart living* ini. Dikutip dari Dinas Kominfo Jateng (2022) Kelurahan Semanggi, yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, memiliki kawasan kumuh seluas sekitar 6,353 hektar di lahan HP-16. Di area ini terdapat 470 unit bangunan dengan total 558 Kepala Keluarga (KK) dan populasi sekitar 1.953 orang. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, dan pedagang dengan pendapatan antara Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di kawasan Semanggi termasuk dalam kategori pekerja informal dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kondisi ini menyebabkan terjadinya permukiman kumuh karena keterbatasan kemampuan mereka untuk membangun rumah yang layak dan kesulitan memperoleh tempat tinggal yang sesuai, sehingga banyak yang membangun rumah di lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

Pada tahun 2018, pemerintah pusat melalui Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan Kotaku memfokuskan penataan kawasan kumuh di daerah Semanggi, mengingat luas wilayah kumuh yang signifikan di kawasan ini paling besar dari beberapa titik yang ada serta ada yang berdiri diatas lahan negara dengan total 214 rumah di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo. Relokasi kampung kumuh ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan salah satu dimensi program *smart city* di Kota Surakarta yaitu *smart living*.

Pemerintah sebagai aktor sentral dalam implementasi program *smart city* ini memiliki komitmen yang besar dalam pelaksanaannya, hal ini terbukti dengan pelaksanaan salah satu program relokasi di Kelurahan Semanggi dalam menuntaskan perihal permasalahan kampung kumuh di Surakarta, program relokasi ini sejalan dengan salah

satu dimensi *smart city* yaitu *smart living*. Dalam pelaksanaannya pemerintah tentunya tidak sendiri, perlu adanya kolaborasi dengan aktor lain dalam pelaksanaan implementasi Program *Smart Living* ini. Salah satu aktor yang berperan penting dalam implementasi Program ini adalah masyarakat, mereka sebagai aktor paling dekat dengan lingkungan tersebut seharusnya sadar akan lingkungan yang mereka tinggali. Masyarakat seharusnya sadar akan kebersihan lingkungan tersebut sehingga lingkungan tersebut terbebas dari kekumuhan, maka dari itu masyarakat tersebut diharapkan lebih sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka agar terhindar dari penyakit dan bahaya lingkungan lainnya. Masyarakat sebagai penghuni tetap dalam kawasan revitalisasi tersebut. Masyarakat berperan menjaga lingkungan yang telah direvitalisasi oleh program pemerintah agar tetap dalam kondisi yang bersih, higienis dan sehat. Fasilitas pemerintah yang telah dibangun sejatinya harus dijaga oleh seluruh kalangan masyarakat sebagai kelompok yang bersinggungan langsung dengan lingkungan tersebut, akan tetapi dalam fakta observasi yang salah lakukan di Kelurahan Semanggi ternyata masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas-fasilitas tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam gambar yang saya dokumentasikan dibawah ini :

Gambar 1. Keadaan kampung Semanggi

Keadaan Kampung Semanggi Sebelum Revitalisasi	Keadaan Kampung Semanggi Pada Tahun 2023	Keadaan Kampung Semanggi Pada Tahun 2024
		
		
		



Dari data observasi yang diatas dapat dilihat bahwa terjadi suatu ketimpangan dalam pengelolaan lingkungan tersebut. Hal ini seharusnya menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan bahwa mengelolaan dan perawatan fasilitas yang sudah ada merupakan hal penting yang harus dijalankan dalam mewujudkan *Smart Living* di Kota Surakarta.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul "*Implementasi Program Smart Living di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta*" Dengan alasan untuk mendeskripsikan serta menggambarkan bagaimana pengimplementasian dari program *smart living* di Kota Surakarta sehingga dapat mengeksplorasi bagaimana penerapan *smart city* terkhusus dimensi *smart living* di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, serta untuk menganalisis dampak dan efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Dengan fokus pada isu ini, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan visi kota cerdas yang berkelanjutan.

## 2. Tinjauan Pustaka

Implementasi merupakan kajian yang fokus pada proses pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2018: 728). Namun, analisis implementasi kebijakan diperlukan karena terdapat fakta empiris yang menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan pemerintah berhasil diimplementasikan dengan baik. Hal ini terjadi karena dalam proses implementasi kebijakan, sering muncul masalah-masalah yang tidak dipersiapkan secara konseptual, dan inkonsistensi di kalangan pelaksana kebijakan sering menjadi hambatan. Model implementasi kebijakan top-down yang dikembangkan oleh George C. Edward III, yang dikenal dengan "*direct and indirect impact on implementation*," mencakup empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:

### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

### 2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumber daya, Schermerhorn, Jr

(1994:14) mengelompokkan sumber daya ke dalam: "*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*". Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari: "*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*". Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang di dalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan.

### 3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan : "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana memiliki sikap positif dan mendukung implementasi kebijakan, maka kemungkinan besar kebijakan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan awal. Sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak kebijakan tersebut karena adanya konflik kepentingan, maka implementasi kebijakan akan menghadapi hambatan yang signifikan.

### 4. Birokrasi

Birokrasi adalah salah satu institusi yang paling sering, bahkan secara keseluruhan, menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya terdapat dalam struktur pemerintahan, tetapi juga ada di organisasi swasta, institusi pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus, birokrasi bahkan dibentuk khusus untuk menjalankan kebijakan tertentu. Menurut Edwards III dalam Winarno, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu: "Standard Operating Procedure (SOP) merupakan respons terhadap tuntutan internal untuk kepastian waktu, sumber daya, dan kebutuhan penyeragaman dalam organisasi yang kompleks dan luas."

## 3. Metodologi

Studi yang dilakukan mengadopsi metode deskriptif dengan cara pandang kualitatif. Di dalam penelitian ini, penulis memaparkan proses penerapan kebijakan pemerintah terkait program *smart living*. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini mencakup hasil observasi serta wawancara yang dilakukan dengan tiga informan. Informan terdiri dari Kepala Bagian Infrastruktur dan Kewilayahannya Bappeda Kota Surakarta, Kasi Pembangunan Kelembagaan Semanggi dan Masyarakat Semanggi. Tiga informan dipilih karena mereka karena dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, peneliti juga mewawancarai masyarakat untuk memahami sudut pandang mereka sebagai komunikator dalam kebijakan publik. Selain wawancara, peneliti juga mengamati secara langsung lokasi tempat revitalisasi di Kelurahan Semanggi. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber dokumentasi, termasuk catatan-catatan hasil pengamatan, dokumen arsip, serta berbagai dokumen pendukung yang didapatkan dari lokasi penelitian yaitu Bappeda Kota Surakarta dan Kelurahan Semanggi. Selain itu, catatan yang dibuat selama proses penelitian berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk studi ini. Peneliti menggunakan model interaktif Miles dan Huberman untuk menganalisis data kualitatif dalam penelitian ini (Sugiyono, 2017, p. 132). Terdapat 4 (empat) alur kegiatan yang

terjadi, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan antara lain :

#### a. Indikator Komunikasi

##### 1. Transmisi

Pemerintah mengambil peranan penting dalam pengimplementasian kebijakan program *smart living* di Kelurahan Semanggi. dalam penyampaian informasi tentang pengimplementasian program ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan bernegosiasi secara langsung kepada masyarakat yang terdampak di Kelurahan Semanggi. pemerintah memanggil mereka ke Balai Kota Surakarta untuk diberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bagaimana mekanisme dan bagaimana pengimplementasian program ini dalam jangka waktu tertentu.

##### 2. Kejelasan

Kejelasan informasi merupakan salah satu sub indikator yang dapat menilai bagaimana kebijakan tersebut dapat terimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan, tidak hanya pelaksana kebijakan saja tetapi masyarakat yang terdampak dalam pengimplementasian program *smart living* ini haruslah jelas dan tidak berubah ubah.

##### 3. Konsistensi

Konsistensi informasi dalam implementasi program *smart living* di Kelurahan Semanggi ini terlihat dalam sikap aparatur dalam menyampaikan informasi. Aparatur pemerintah sebagai aktor sentral harus konsisten dalam penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan dam masyarakat terdampak di Kelurahan Semanggi. Apabila pemerintah tidak menyampaikan informasi secara konsisten maka akan menyebabkan tujuan yang telah dirumuskan untuk mengentaskan perkampungan kumuh di Kota Surakarta tidak akan tercapai.

#### b. Indikator Sumberdaya

##### 1. Staf

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat dominan dalam setiap pelaksanaan program atau kebijakan. Banyaknya jumlah staf dalam suatu lembaga dalam pengimplementasian program dapat mempermudah kinerja lembaga atau kepemerintahan sehingga menyebabkan keefektifan dalam mengimplementasikan program *smart living* di Kelurahan Semanggi.

##### 2. Informasi

Informasi merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam proses implementasi program *smart living* di Kelurahan Semanggi, hal ini dikarenakan informasi dijadikan sebagai isi dari kebijakan tersebut. Informasi yang relevan dan akurat dapat mengakibatkan keberlangsungan suatu kebijakan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

##### 3. Wewenang

*Authority* atau kewenagan yang ada dalam organisasi menjadikan organisasi yang dimiliki oleh seseorang atau pimpinan menjadi mudah untuk diarahkan dan diatur sesuai dengan tujuan bersama. Kewenangan dalam suatu organisasi

menjamin adanya perlindungan baik secara hukum ataupun perlindungan secara moril yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya. Pemerintah sebagai aktor sentral banyak melakukan kolaborasi dengan CSR dalam usaha pemenuhan kebutuhan bagi para pelaksana kebijakan.

4. Fasilitas

Pemenuhan fasilitas dalam implementasi program *smart living* di Kelurahan Semanggi ini sangat konkret bagi pelaksana kebijakan sehingga para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan pekerjaannya sangat tertunjang dengan fasilitas-fasilitas yang ada sehingga implemetasi berjalan dengan baik dan efisien.

c. Indikator Disposisi

1. Penempatan Pegawai

Pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan harus melibatkan individu yang memiliki dedikasi terhadap program *smart living* yang telah ditetapkan, terutama yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Proses staffing atau pengangkatan aparatur merupakan salah satu fungsi manajerial yang berkaitan dengan penyusunan personalia di suatu instansi, mulai dari perekrutan tenaga kerja, pengembangan, hingga upaya agar setiap pegawai dapat memberikan kontribusi maksimal kepada organisasi.

2. Insentif

Insentif adalah suatu bentuk motivasi yang mendorong aparatur pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya dengan kemampuan maksimal. Insentif ini merujuk pada pendapatan tambahan di luar gaji atau upah yang telah ditetapkan. Pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan bertujuan untuk memotivasi, merangsang, dan mendorong pelaksanaan kebijakan guna meningkatkan kinerja, sehingga pelaksanaan program *smart living* di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dapat berjalan dengan baik.

d. Indikator Struktur Birokrasi

1. *Standard operational procedure* (SOP)

Dalam pengimplementasian kebijakan/program sangat diperlukan SOP dalam menunjang keberhasilan suatu program tersebut. SOP selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. sistem yang digunakan oleh pemerintah adalah sistem *bottom up* dan melalui proses yang panjang. Setelah diterbitkannya SK Walikota tahun 2020 nomer 640/69.9 Tahun 2020, RP3KP dan PERDA PKP pemerintah baru membuat daftar prokja dan kemudian menjalankan prokja (kelompok kerja)

2. Fragmentasi

Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam kegiatan sangat berpengaruh terhadap Implementasi program *smart living* di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Surakarta berlangsung baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama antara pemerintah, CSR, dan masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan program *smart living* di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.

## 4.2. Pembahasan

### a. Indikator Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi program *smart living* di Kelurahan Semanggi ini mengacu pada tiga sub indikator yang sangat krusial, yakni transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Ketiga aspek ini memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan pengimplementasian kebijakan tersebut. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai setiap sub indikator.

Aspek pertama yaitu transmisi, berjalan dengan efektif. Pemerintah telah menjalankan perannya sebagai komunikator utama melalui sosialisasi dan penyuluhan, serta memberikan kompensasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam proses transisi. Komunikasi yang dilakukan pun bersifat partisipatif, di mana masyarakat diberikan ruang untuk memahami dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang akan terjadi. Hal ini menjadi indikator penting bahwa kebijakan yang diterapkan telah mengikuti prosedur komunikasi yang tepat, dengan harapan bahwa hasil akhirnya adalah lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni bagi masyarakat di Kelurahan Semanggi.

Aspek kedua yaitu Kejelasan, pemerintah telah memenuhi indikator kejelasan informasi dalam implementasi program *smart living* di Kelurahan Semanggi. Sosialisasi dilakukan dengan metode yang efektif, melalui pendekatan langsung, pembentukan pokja, serta pemberian kompensasi yang sesuai. Kejelasan informasi ini menjadi faktor utama dalam keberhasilan program, karena masyarakat tidak hanya menerima kebijakan dengan baik, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Namun kurangnya pemahaman masyarakat akan arahan pemerintah untuk menjaga lingkungan setelah direvitalisasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi program ini belum mendukung pencapaian tujuan revitalisasi perkampungan kumuh di Kota Surakarta.

Aspek ketiga yaitu konsistensi, berjalan dengan baik pemerintah Kota Surakarta telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga konsistensi informasi terkait program *smart living* di Kelurahan Semanggi. Konsistensi ini tidak hanya membantu masyarakat memahami program dengan lebih baik, tetapi juga mengurangi potensi resistensi yang mungkin muncul akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman informasi.

### b. Indikator Sumberdaya

Sumber Daya dalam implementasi program *smart living* di Kelurahan Semanggi ini mencakup empat komponen utama yang memengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu Staf, Informasi, Kewenangan, dan Fasilitas. Setiap komponen ini memiliki peran penting dalam kelancaran pelaksanaan program dan efektivitasnya. Berikut adalah pembahasannya:

Aspek pertama yaitu staf, ketersediaan dan peran sumber daya manusia dalam implementasi program *smart living* di Kelurahan Semanggi telah sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah telah menyediakan staf yang kompeten dalam menjalankan program ini, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses implementasi dan keberlanjutan program. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tetapi juga menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat

sehingga hasil dari program smart living dapat terjaga dalam jangka panjang. Oleh karena itu, aspek sumber daya manusia dalam implementasi program ini dapat dikatakan telah memenuhi indikator keberhasilan dalam kebijakan publik.

Aspek kedua yaitu informasi, ketersediaan informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan implementasi program *smart living* di Kelurahan Semanggi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program ini. Dengan adanya informasi yang cukup, pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif, sehingga implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu merupakan elemen penting dalam kesuksesan suatu kebijakan atau program pemerintah. Keberhasilan program *smart living* di Kelurahan Semanggi yang kini dapat dihuni dengan layak oleh masyarakat merupakan bukti bahwa proses pengambilan keputusan yang berbasis informasi yang valid dan menyeluruh telah berjalan dengan baik.

Aspek ketiga yaitu kewenangan, kewenangan pemerintah dalam mengelola program *smart living* di Kelurahan Semanggi telah berjalan dengan baik. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk CSR, menjadi strategi efektif dalam memastikan pemenuhan kebutuhan selama implementasi program. Dengan adanya dukungan yang memadai, baik untuk pelaksana kebijakan maupun masyarakat terdampak, proses revitalisasi dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien. Hal ini membuktikan bahwa kewenangan yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi langsung terhadap keberhasilan suatu kebijakan.

Aspek keempat yaitu fasilitas, pemerintah telah menyediakan sumber daya manusia yang kompeten serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap implementasi, memastikan efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, ketersediaan informasi yang akurat mendukung pengambilan keputusan yang tepat, sedangkan kewenangan yang dikelola dengan baik memungkinkan adanya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan program. Dari segi fasilitas, sebagian besar sarana dan prasarana telah tersedia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, optimalisasi seluruh komponen sumber daya belum sepenuhnya baik dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas program *smart living* di Kelurahan Semanggi.

### c. Indikator Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan disebut Disposisi. Dua aspek yang perlu diperhatikan dalam mengatasi dampak dan perilaku birokrat atau pelaksana yang sering kali mengesampingkan pelaksanaan program yang telah dibuat, yaitu:

Aspek pertama yaitu penempatan pegawai, proses *staffing* dalam implementasi program *Smart Living* di Kelurahan Semanggi telah berjalan dengan baik. Pemerintah telah menempatkan pegawai berdasarkan kapasitas dan kompetensinya, serta melibatkan masyarakat dalam peran yang sesuai. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan ini menjadi lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan program dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

Aspek kedua yaitu insentif, Pemberian insentif dalam program *Smart Living* di Kelurahan Semanggi menjadi salah satu bentuk apresiasi dan dorongan bagi para

pelaksana kebijakan untuk bekerja secara optimal. Incentif yang diberikan diharapkan mampu menjaga komitmen dan semangat kerja para petugas yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program. Namun kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan ini tercermin dari minimnya gotong royong dan piket kebersihan di kawasan tersebut. Masyarakat cenderung menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada petugas kebersihan, padahal mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan mereka sendiri. Sehingga kebijakan ini masih masif.

#### d. Struktur Birokrasi

Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure*" (SOP) dan Fragmentasi yang merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Kedua karakteristik tersebut harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan, lebih lanjut kedua karakteristik seperti yang dibawah ini :

Aspek pertama yaitu SOP atau *Standard Operating Procedure*, SOP yang diterapkan oleh pemerintah sudah efektif dalam membantu jalannya implementasi program, serta memastikan bahwa setiap tahapan program dilakukan dengan terstruktur dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Sistem ini memungkinkan pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan transparansi dan memastikan keberlanjutan serta keberhasilan program, mengingat adanya kejelasan prosedur yang mengatur semua tahapan dari awal hingga akhir.

Aspek kedua yaitu fragmentasi, Pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dapat mencegah tumpang tindih dalam pelaksanaan program. Selain itu, adanya koordinasi yang intens antar pihak-pihak tersebut juga memastikan agar semua sumber daya dan dana yang dibutuhkan tersedia dan digunakan dengan tepat. Kolaborasi ini tercermin dalam cara pemerintah melakukan pendekatan kepada berbagai pihak, baik masyarakat, lembaga CSR, maupun badan-badan pemerintah lain, untuk memastikan bahwa kebutuhan sumber daya dan pembangunan infrastruktur dapat dipenuhi dengan baik.

### 5. Kesimpulan

Implementasi Program *Smart Living* di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta sudah berjalan baik Demikian, secara menyeluruh, penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program *Smart Living* di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta telah berhasil mencapai pencapaian yang positif dalam empat dimensi Implementasi. Dimensi Komunikasi, Dimensi Sumberdaya, Dimensi Disposisi, dan Dimensi Birokrasi. Oleh karena itu, meskipun menghadapi hambatan, Implementasi ini tetap memberikan dampak positif dalam pengentasan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Beikut kesimpulan per dimensi :

#### a. Komunikasi

Dari indikator transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi menjadi elemen yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta telah berjalan dengan baik karena memenuhi ketiga indikator tersebut. Dengan adanya komunikasi yang runtut, jelas, dan konsisten, proses implementasi program *smart living* di Kelurahan Semanggi

dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai informasi dan arahan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi program ini belum mendukung pencapaian tujuan revitalisasi perkampungan kumuh di Kota Surakarta.

b. Sumberdaya

Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan optimalisasi empat komponen utama, yaitu staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Pemerintah telah menyediakan sumber daya manusia yang kompeten serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap implementasi, memastikan efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, ketersediaan informasi yang akurat mendukung pengambilan keputusan yang tepat, sedangkan kewenangan yang dikelola dengan baik memungkinkan adanya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan program. Dari segi fasilitas, sebagian besar sarana dan prasarana telah tersedia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, optimalisasi seluruh komponen sumber daya belum efektif dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas program *smart living* di Kelurahan Semanggi.

c. Disposisi

Dalam implementasi program *Smart Living* di Kelurahan Semanggi, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh aspek penempatan pegawai dan pemberian insentif. Pemerintah telah menerapkan prinsip "*the right man in the right place*" dalam menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi dan keahliannya, serta melibatkan masyarakat dalam peran yang sesuai untuk menjaga keberlanjutan program. Selain itu, pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan, termasuk petugas kebersihan, menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan motivasi kerja dan efektivitas pelaksanaan program. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga hasil revitalisasi. Oleh karena itu, optimalisasi disposisi pelaksana kebijakan melalui penempatan pegawai yang tepat dan pemberian insentif yang belum dikatakan baik dalam memastikan keberlanjutan program *Smart Living* di Kelurahan Semanggi.

d. Struktur Birokrasi

Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi yang terstruktur. SOP yang jelas dan terarah memungkinkan pelaksanaan program berjalan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga setiap tahapan program dapat dilakukan secara sistematis. Sementara itu, fragmentasi dalam bentuk pembagian tugas yang jelas antar instansi dan sektor swasta memastikan bahwa setiap pihak memiliki peran yang terdefinisi dengan baik, sehingga dapat mencegah tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Meskipun fragmentasi menambah kompleksitas dalam koordinasi, dengan adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, program dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal. Keberhasilan implementasi program *Smart Living* di Kelurahan Semanggi mencerminkan bahwa pengelolaan birokrasi yang efektif, melalui penerapan SOP yang sistematis dan koordinasi fragmentasi yang baik, merupakan faktor utama

dalam memastikan keberlanjutan dan dampak positif dari kebijakan pembangunan di tingkat lokal.

## 6. Daftar Pustaka

- Alfianita, S., & Rachmawati, R. (2021). *Kesiapan Implementasi Smart City di Kota Surakarta*. [Tesis]. Universitas Gadjah Mada. Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/115413>.
- Borsekova, K., dkk. (2018). *Kota Cerdas: Pendekatan Komprehensif terhadap Pembangunan Perkotaan*. Jurnal Teknologi Perkotaan.
- Bungin, Burhan, (2012). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Caragliu, C. Del Bo, and P. Nijkamp, (2011) “Smart cities in Europe”, *Journal of Urban Technology*, vol. 18(2), pp. 65-82. Diakses 28 Oktober 2024, dari Google Scholar.
- Cocchia A. (2014). *Smart and digital city: A systematic literature review*. In Dameri R. P., Rosenthal-Sabroux C. (Eds.), *Smart city* (pp. 13– 43). New York, NY: Springer. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari Sage Journals.
- Creswell, Jhon W, (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8.6 Tahun 2022. (2022). *Master Plan Smart City Periode 2021-2026*. Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta.
- Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Wahyudi, dkk. (2022). *Urbanisasi dan Tantangan Sosial di Indonesia* . Jurnal Penelitian Sosial

## WEBSITE

- Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta. (2021). *Data Populasi Kota Surakarta*. Surakarta: BPS.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Komitmen Wujudkan Smart City, Pemerintah Kabupaten Tegal Susun Masterplan*. Diakses dari [aptika.kominfo.go.id](http://aptika.kominfo.go.id) pada 29 Oktober 2024
- Sekretariat Daerah (SETDA) Kota Surakarta. (2023). *Revitalisasi Kampung Semanggi Harmoni: Keindahan dalam Jejak Sejarah yang Berkelas*. Diakses <https://setda.surakarta.go.id/page/detail> pada 10 Februari 2025

